



Volume 8 No. 2, PP 59 – 74; Desember 2017

ANALISIS WACANA BERITA PEMBLOKIRAN WEBSITE ISLAM RADIKAL PADA WEBSITE REPUBLIKA ONLINE

Abdul Basith^{1(*)}, Yayah Nurhidayah², Muhammad Ghulzar Simsimany³

Dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah^{1,2}

Mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam³

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

abdul.basit@syekh Nurjati.ac.id^(*), yayah.nurhidayah@syekh Nurjati.ac.id², mg.simsimany.kpi@syekh Nurjati.ac.id³

ABSTRAK

Banyak pemahaman dan opini dari berbagai golongan umat Islam kini, ada beberapa yang pemahaman yang dinilai meresahkan sebagian masyarakat. Pemahaman tersebut terkait dengan pemahaman Islam garis keras atau yang disebut sebagai gerakan radikal. Dari latar belakang permasalahan yang dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai Analisis Wacana Berita Pemblokiran Website Islam Radikal Pada Website Republika Online Bulan April 2015. Hal yang diteliti mengerucut pada masalah bagaimana wacana berita pemblokiran website pada republika online pada tingkatan dimensi teks dari segi tematis, bagaimana wacana berita pemblokiran website pada republika online pada tingkatan dimensi teks dari segi skematis, bagaimana wacana berita pemblokiran website pada republika online pada tingkatan dimensi teks dari segi semantik, dan bagaimana keseluruhan wacana yang diarahkan republika.co.id terkait berita pemblokiran website Islam radikal. Metode penelitian ini ialah penelitian kualitatif. Teknik Pengumpulan Data menggunakan teknik Dokumentasi, yaitu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Hasil penelitian, dari segi tematis wacana yang terdapat pada berita di republika online terkait pemblokiran website ditampilkan dengan sangat beragam dan menarik, serta berimbang. Dari segi skematis, wacana yang terdapat pada berita direpublika online terkait pemblokiran website disajikan dengan baik dan berkesinambungan, sehingga wacana yang dihadirkan dapat dengan baik diterima oleh pembaca. Dari segi semantik, wacana disajikan dengan sangat baik dan lugas, latar belakang, detail yang melengkapi, penekanan, pengandaian dan ilustrasi tersusun dengan pas dan menghidupkan wacana pemblokiran. Arah wacana yang dihadirkan republika online lebih condong kepada kontra terhadap pemblokiran website Islam.

Kata Kunci: wacana, online, tematis, skematis, semantik

PENDAHULUAN

Diantara banyak pemahaman dan opini dari berbagai golongan umat Islam kini, ada beberapa yang pemahaman yang dinilai meresahkan sebagian masyarakat. Pemahaman tersebut terkait dengan pemahaman Islam garis keras atau yang disebut sebagai gerakan radikal. Sebuah istilah yang diberikan kepada kelompok-kelompok yang beraliran keras dalam menuntut penegakan syariat dengan jalan yang dianggap sebagai jihad (Suprihatiningsih, 2012: 372).

Faham-faham garis keras tersebut merebak seiring berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi, sehingga pencegahan yang dilakukan lebih lanjut guna menghindari berkembangnya media kelompok garis keras yang erat kaitanya dengan isu terorisme yang berujung pada perpecahan antara sesama bangsa dan antar negara

Implikasinya fenomena diatas menjadi pusat pemberitaan di seuruh media, terutama sekitar bulan april 2015. Kominfo memblokir 22 situs Islam atas permintaan BNPT. Ke-22 situs tersebut diduga menyebarkan faham garis keras yang diduga dapat membahayakan keutuhan NKRI.

Sebagaimana dipaparkan dalam situs Kominfo:

"Ada 22 situs internet radikal yang diadakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)," kata Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemkominfo, Ismail Cawidu dalam keterangannya di situs Kominfo.¹

Pemblokiran tersebut memunculkan adanya polemik dimasyarakat antara mereka yang mendukung pemblokiran situs radikal, dengan mereka yang tidak mendukung bahkan memprotes tindakan kominfo tersebut.

Salah satu kelompok yang mendukung datang dari kalangan Islam moderat, yang menganggap gerakan Islam radikal tersebut mengganggu ketenangan umat Islam di Indonesia sebagaimana dikatakan. Hasyim Muzadi pada sebuah media online:

Mantan ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Hasyim Muzadi berpendapat, dasar negara yang diwakili oleh pemerintah dalam memblokir situs radikalisme adalah pertama keselamatan dan ketenangan masyarakat (umat Islam) serta keselamatan negara. Kedua keselamatan agama itu

¹<http://teknoliputan6.com/read/2199730/kominfo-blokir-22-situs-yang-dianggap-radikal> pada tanggal 28 November 2015.

sendiri. Situs-situs tersebut sesungguhnya telah mengganggu ketenangan masyarakat, negara dan agama, karena ini adalah *ghozwatul fikri* (perang opini). Jadi wajar jika pemerintah menutup situs-situs yang dianggap radikal untuk mencegah terjadinya benturan antar sesama muslim.²

Sementara masyarakat yang memprotes tindakan Kominfo. Mereka menganggap bahwa pemerintah gegabah dan membatasi kebebasan berpendapat, akibatnya pihak-pihak yang diblokir tidak menerima bahwa situs-situs dinilai radikal. Sebagaimana dinyatakan Mahladi seorang Pimred Hidayatullah.com salah satu situs yang diblokir kominfo:

Mahladi menilai sikap pemerintah melakukan pemblokiran sebagai bentuk ketidakadilan. "Jika memang [berita](#) kami dirasa radikal, seharusnya [berita](#) itu saja yang dicabut. BNPT mengatakan hanya ada dua berita kami yang dianggap berbahaya. Kalau diminta, detik itu juga akan saya hapus. Mengapa sampai melakukan pemblokiran sepihak," tuturnya.³

Selain itu ada juga yang menilai bahwa pemblokiran situs berkonten radikal oleh kominfo tidak efektif, seperti

²<http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44-id,58744-lang,id-c,nasional-t,Blokir+Situs+Radikal+-.phpx> pada tanggal 11 April 2015 pukul 14:40

³<http://www.merdeka.com/peristiwa/pernah-diblokir-hidayatullahcom-masih-tak-terima-dianggap-radikal.html> pada tanggal 28 November 2015 pukul 15:15

disampaikan wakil ketua DPR Fadli Zon pada republika.co.id:

Wakil Ketua DPR Fadli Zon juga pernah meminta kebijakan pemblokiran 22 situs dicabut karena pemblokiran dilakukan tanpa melalui mekanisme yang ada dan tanpa didasari aturan perundang-undangan yang berlaku. Fadli Zon mengatakan seharusnya pemerintah melakukan konsultasi dengan para ahli, cendekiawan dan organisasi keagamaan seperti Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia sebelum melakukan pemblokiran.⁴

Masih kurangnya pengawasan akan media sosial internet dan website membuat isi dan konten informasi dari media tersebut sulit terkendali, serta dalam permasalahan website radikal ini belum ada acuan yang jelas dan pokok yang menentukan suatu website bisa dinilai radikal atau tidak.

Internet melalui website merupakan media yang bersifat bebas dan tidak mudah dalam mengawasi dan memilahnya. Semua pihak baik formal maupun nonformal, baik kelompok maupun individu, dari berbagai kalangan dan strata sosial bebas dengan leluasa menuangkan opini dan pemikirannya

⁴<http://www.republika.co.id/berita/trendtek/internet/15/04/07/nmetpd-pemblokiran-situs-berkonten-negatif-kemenkominfo-dinilai-tidak-efektif> pada 28 November 2015

kedalam internet. Dan dapat dengan sangat mudah diakses dan dibaca oleh publik dimanapun ia berada. Dengan berbagai tujuan dan maksud yang beraneka ragam.

Dalam fenomena ini, kemkominfo sebagai sebuah lembaga pemerintah yang berusaha menjadi pengawas dan pengontrol laju perkembangan informasi yang terdapat dalam internet, mencoba untuk melaksanakan tugasnya dengan memblokir beberapa website yang dianggap memiliki konten radikal yang membahayakan keutuhan negara. Namun tindakan tersebut menuai pro dan kontra dari berbagai lapisan masyarakat. Sehingga menjadi suatu hal yang menarik untuk dikaji.

Dari latar belakang permasalahan yang dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai Analisis Wacana Berita Pemblokiran Website Islam Radikal Pada Website Republika Online Bulan April 2015. Hal yang diteliti mengerucut pada masalah bagaimana wacana berita pemblokiran website pada republika online pada tingkatan dimensi teks dari segi tematis, bagaimana wacana berita pemblokiran website pada republika online pada tingkatan dimensi teks dari segi skematis, bagaimana wacana berita pemblokiran website pada republika online pada tingkatan dimensi teks dari segi

semantic, dan bagaimana keseluruhan wacana yang diarahkan republika.co.id terkait berita pemblokiran website Islam radikal.

METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah proses penelitian dan pemahaman, yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Creswell, menyatakan penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami (Noor, 2011:34).

2. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan analisis wacana .Analisis wacana adalah telaah mengenai aneka fungsi (fragmatik) bahasa.Kita menggunakan bahasa dalam kesinambungan atau untaian wacana. Tanpa *konteks*, tanpa hubungan-hubungan wacana yang bersifat antar kalimat dan supra kalimat maka kita sukar berkomunikasi dengan tepat satu sama lain (Tarigan, 1993:24).

Analisis wacana adalah ilmu baru yang muncul beberapa puluh tahun belakangan ini. Aliran aliran linguistik selama ini membatasi penganalisaanya hanya kepada soal kalimat dan barulah belakangan ini sebagian ahli bahasa memalingkan perhatiannya kepada penganalisaan wacana (Lubis, 1993:12).

Analisis wacana lahir dari kesadaran bahwa persoalan yang terdapat dalam komunikasi bukan terbatas pada penggunaan kalimat atau bagian kalimat, fungsi ucapan, tetapi juga mencakup struktur pesan yang lebih kompleks dan inheren yang disebut wacana (Littlejohn, 1996:84). Dalam upaya menganalisis unit bahasa yang lebih besar dari kalimat tersebut, analisis wacana tidak lepas dari pemakaian kaidah berbagai cabang ilmu bahasa, seperti halnya semantic, sintaksis, morfologi, dan fonologi (Sobur, 2002:48).

Analisis wacana kritis (AWK) adalah sebuah upaya atau proses (penguraian) untuk memberi penjelasan dari sebuah teks (realitas sosial) yang mau atau sedang dikaji oleh seseorang atau kelompok dominan yang kecenderungannya mempunyai tujuan tertentu untuk memperoleh apa yang diinginkan (Aliyah, 2013:49).

3. Sumber Data

Data merupakan hasil pengamatan maupun pencatatan-pencatatan terhadap suatu objek selama penelitian tersebut yang berupa angka maupun fakta. Dalam hal ini ada dua jenis data yang biasa digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumbernya. Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai pengumpul data. Sedangkan data sekunder ialah informasi yang telah dikumpulkan pihak lain. Jadi peneliti tidak langsung memperoleh data dari sumbernya. Disini peneliti bertindak sebagai pemakai data (Susanto, 2006:125).

Data primer dalam penelitian ini berupa berita yang dimuat pada kolom warta pada website republika.co.id tentang dibokirnya website Islam.

Adapun data sekunder dari penelitian ini ialah dalam bentuk buku referensi, berita online, Koran, jurnal/laporan yang relevan dengan objek kajian dan sumber berita lain dalam media maupun internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam proposal penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik Dokumentasi, yaitu cara mengumpulkan data melalui

peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. (Margono, 1997 : 181). Dalam hal ini tentunya penulis mengumpulkan berita yang di muat di website republika.co.id sebagai data yang nanti akan ditelaah menggunakan analisis wacana.

5. Teknis Analisis Data

Adapun teknis analisis wacana yang digunakan ialah analisis wacana model Van Dijk. Suatu model analisis yang mengkolaburasikan elemen-elemen wacana sehingga mengungkap bagaimana sebuah pendapat disampaikan dalam sebuah tulisan.

Analisis wacana yang menggunakan pendekatan kritis memperlihatkan keterpauduan: (a) analisis teks; (b) analisis proses, produksi, konsumsi, dan distribusi teks; serta (c) analisis sosiokultural yang berkembang disekitar wacana itu (Badara, 2012:26)

Adapun analisis wacana yang digunakan ialah model Teun A. van dijk. Melalui berbagai karyanya van dijk melihat suatu wacana terdiri atas berbagai struktur tingkatan, yang masing masing bagian saling mendukung. Van dijk

membaginya kedalam tiga tingkatan; (1) Struktur makro, ini merupakan makna global/umum dari suatu teks yang dapat diamati dengan melihat topic dari suatu teks. Tema wacana ini bukan hanya isi, tetapi juga sisi tertentu dari suatu peristiwa, (2) superstruktur adalah kerangka suatu teks, bagaimana struktur dan elemen wacana itu disusun dalam teks secara utuh, dan (3) struktur mikro adalah makna yang dapat diamati dengan menganalisis kata, kalimat, proposisi, anak kalimat, para frase yang dipakai, dan sebagainya. Struktur wacana Van Dijk ini dapat digambarkan sebagai berikut (Bungin, 2007:203):

Dalam penelitian ini penulis akan menelaah 3 berita yang ada pada republika.co.id pada tahun 2015 dengan menggunakan kerangka van Dijk ini, dari segi stuktur makro yaitu unsur tematik dari segi super struktur akan mengulik unsur skematis dan dari segi stuktur mikro akan meneliti unsur semantik saja, mengingat terbatasnya wilayah dan waktu kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Republika Online

a. Sejarah Berdiri dan Perkembangan

ROL hadir sejak 17 Agustus 1995, dua tahun setelah Harian Republika terbit.

ROL merupakan portal berita yang menyajikan informasi secara teks, audio, dan video, yang terbentuk berdasarkan teknologi hipermedia dan hiperteks. Dengan kemajuan informasi dan perkembangan sosial media, ROL kini hadir dengan berbagai fitur baru yang merupakan percampuran komunikasi media digital. Informasi yang disampaikan diperbarui secara berkelanjutan yang terangkum dalam sejumlah kanal, menjadikannya sebuah portal berita yang bisa dipercaya.⁵

Republika sendiri adalah [koran](#) nasional yang dilahirkan oleh kalangan komunitas [muslim](#) bagi publik di [Indonesia](#). Republika terbit perdana pada [4 Januari 1993](#). Koran ini terbit di bawah bendera perusahaan PT Abdi Bangsa yang kemudian mayoritas saham koran ini dimiliki oleh kelompok [Mahaka Media](#).

Walau berganti kepemilikan, Republika tak mengalami perubahan visi maupun misi. Namun harus diakui, ada perbedaan gaya dibandingkan dengan sebelumnya. Sentuhan bisnis dan independensi Republika menjadi lebih kuat. Karena itu, secara bisnis, koran ini terus berkembang. Republika menjadi

makin profesional dan matang sebagai koran [nasional](#) untuk komunitas muslim. Direktur utama Republika saat ini adalah [Erick Thohir](#) yang juga merupakan Ketua Umum [Asosiasi Televisi Swasta Indonesia](#) (ATVSI) periode [2010 - 2013](#).⁶

b. Rubrikasi Republika Online

Dalam sebuah media pemberitaan, tak terlepas dari apa yang dinamakan rubrik. Rubrik dalam republika cukup variatif. Adapun rubrik yang terdapat pada [republika.co.id](#) ialah nasional, internasional, sepak-bola, khazanah, jurnal-haji. Dan lain-lain.

[News](#), yang berisi berita-berita di dalamnya terdapat sub rubrik, seperti internasional, regional dan lain-lain. Pada rubrik [ekonomi](#) disajikan banyak berita berkaitan informasi perekonomian terkini

Rubrik paling khas yang menunjukkan identitas republika ialah rubrik [Khazanah](#), di dalamnya terdapat banyak sekali berita, informasi, dan terdapat juga tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan materi ke-Islaman. Selain itu ada juga rubrik [Oto-Tek](#), [Inpicture](#), [Video](#), [Publika](#), serta [English Indeks](#).

⁵Dikutip dari <http://www.republika.co.id/page/about> pada 28 November 2015

⁶Dikutip dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Republika_\(surat_kabar\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Republika_(surat_kabar)) pada 12 Desember 2015

Kini republika telah memperbaharui tampilan websitenya dengan lebih simple dan bersih. Secara singkat republika memiliki beragam rubrik yang menarik dan memiliki beberapa rubric keIslaman yang menjadi cirri khas republika.

2. Deskripsi Data

- a. Analisis Berita 1 edisi Rabu, 01 April 2015, 17:03 WIB

Polri Kami Punya Bukti 19 Situs Itu Muat Konten Radikal

Red: Esthi Maharani Republika/ Tahta Aidilla



Perwakilan pengelola situs Islam mendengarkan juru bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana Terorisme (BNPT), Irfan Idris (kiri), Staff Ahli bid komunikasi media Hendry Subiakto berbicara saat konferensi pers usai rapat koordinasi di kantor Kominfo, Jakarta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polri memastikan 19 situs yang diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) adalah situs-situs yang mengandung konten radikal.

"Situs-situs itu membahayakan, isinya memprovokasi. Jadi harus diblokir," kata

Kadivhumas Polri Brigjen Anton Charliyan, Rabu (1/4)

Dikatakannya, Polri mengusulkan pemblokiran situs-situs tersebut kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Selanjutnya BNPT meminta Kemkominfo untuk melaksanakan pemblokiran.

"Kami hanya mengimbau saja, lalu BNPT mengusulkan (agar diblokir) ke Kemkominfo," katanya

Ia pun menegaskan pemblokiran dilakukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat.

"Boleh-boleh saja protes, yang jelas kami punya bukti (situs berkonten provokasi)," tegasnya.

Sejumlah pimpinan media yang situsnya diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika mengadu ke Komisi I DPR RI, mengeluhkan pemblokiran tanpa alasan yang kuat.

Sebelumnya Kemenkominfo telah memblokir 19 situs sejak Ahad (29/3) berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai website yang menyebarkan paham atau simpatisan radikalisme.

BNPT melalui surat nomor 149/K.BNPT/3/2015 meminta 19 situs diblokir karena dianggap sebagai situs penggerak paham radikalisme dan sebagai simpatisan radikalisme.

Sejumlah 19 situs tersebut ialah arrahmah.com, voa-Islam.com, ghur4ba.blogspot.com, panjimas.com, thoriquna.com, dakwatuna.com, kafilahmujahid.com, an-najah.net, muslimdaily.net, hidayatullah.com, salam-online.com, aqlIslamiccenter.com, kiblath.net, dakwahmedia.com, muqawamah.com, lasdipo.com, gemaIslam.com, eramuslim.com dan daulahIslam.com.

Sumber : antara

1) Tematik (tema atau Topik)

Tema pada berita ini terdapat pada paragraf pertama, *Polri memastikan 19 situs yang diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) adalah situs-situs yang mengandung konten radikal (Paragraf 1)*. Dapat dianalisa bahwa topik yang terdapat pada berita ini ialah pihak Polri meminta akan adanya pemblokiran, dengan bukti-bukti yang telah dimiliki Polri. dengan itu pihak polri menegaskan kepada khalayak bahwa konten tersebut memang memuat konten radikal dengan memiliki bukti bukti yang membenarkan adanya konten radikal tersebut.

2) Skematik (Skema atau Alur)

Skema pada berita ini diawali dengan Penegasan pihak Polri bahwa website website tersebut mengandung konten radikal. Kemudian berlanjut pada Penjelasan awal mula pemblokiran dan Penegasan bahwa pemblokiran atas bukti yang kuat. Serta adanya pengaduan dari pihak pengelola website. Ditutup dengan Penuturan website-website yang di blokir.

3) Semantik (Latar, Detail, Ilustrasi, Maksud, Pengandaian, dan Penalaran)

Latar pada berita ini terdapat pada bagian akhir berita. Disana ditulis sebab adanya penegasan polri terkait pemblokiran website ini. Yaitu adanya laporan dari BNPT kepada Kemkominfo terkait beberapa website yang diduga terdapat didalamnya konten radikal. Pada paragraf ke delapan ditulis "*Sebelumnya Kemenkominfo telah memblokir 19 situs sejak Ahad (29/3) berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai website yang menyebarkan paham atau simpatisan radikalisme. (Paragraf 8)*."Bagian ini merupakan latar dari berita ini.

Adapun Detail yang terdapat dalam berita ini disisipkan pada paragraf kedua yang menuliskan "*Situs-situs itu membahayakan, isinya memprovokasi. Jadi harus diblokir*"(Paragraf 2) merupakan kalimat yang diucapkan oleh Kadivhumas. Kalimat tersebut sengaja di kutipkan penulis berita untuk memperkuat isi dari berita ini. Dan jelas merupakan kalimat penegasan.

Dalam sebuah berita semestinya ada suatu hal yang digambarkan kejadian atau objeknya tentunya dengan kata kata, atau yang disebut **Ilustrasi**. Ilustrasi pada

berita ini terdapat pada paragraf *Sejumlah pimpinan media yang situsnya diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika mengadu ke Komisi I DPR RI, mengeluhkan pemblokiran tanpa alasan yang kuat. (Paragraf 7).* Digambarkan pada berita ini adanya pengaduan dari beberapa pihak yang websitenya diblokir.

Elemen Maksud dari berita ini ialah penegasan kepolisian bahwa website-website tersebut kepada kategori website radikal. Maksud pada berita ini tertuang pada kalimat *"Boleh-boleh saja protes, yang jelas kami punya bukti (situs berkonten provokasi)," tegasnya. (Paragraf 6).* Dengan kalimat *kami punya bukti* lebih menunjukkan hal yang lebih spesifik dari detail sehingga kalimat ini menjadi maksud dari berita ini.

Sebagaimana Pengandian suatu hal yang belum ada yang sengaja dituliskan pada berita agar bisa adanya. pada berita ini pengandaian itu terdapat pada kalimat *"BNPT melalui surat nomor 149/K.BNPT/3/2015 meminta 19 situs diblokir karena dianggap sebagai situs penggerak paham radikalisme dan sebagai simpatisan radikalisme."* (Paragraf 9). Dengan menggunakan kata *meminta*. Jelas bahwa adanya hal yang belum terealisasi dalam hal ini ialah ingin adanya pemblokiran 19 website tersebut.

Penalaran yang digunakan ialah penalaran deduktif. Yaitu cara menjelaskan suatu hal yang masih umum menjadi lebih khusus pada kalimat-kalimat di bawahnya. Seperti pada paragraf ini *Sebelumnya Kemenkominfo telah memblokir 19 situs sejak Ahad (29/3) berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai website yang menyebarkan paham atau simpatisan radikalisme. (Paragraf 7).* Ini merupakan kalimat khusus yang memaparkan dan melengkapi kalimat utama pada paragraf pertama.

b. Analisis Berita 2 Edisi Sabtu, 04 April 2015, 07:27 WIB

Blokir Situs Islam Tindakan Antidemokrasi dan Anti-HAM

Sabtu, 04 April 2015, 07:27 WIB

Red: Esthi Maharani, Mardiyah



22 Situs Islam Diblokir

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Universitas Padjadjaran Atip Latipulhayat mengatakan, pemblokiran situs-situs media Islam oleh

Kemenkominfo atas permintaan BNPT yang menilai sepihak sebagai situs bermuatan radikalisme merupakan tindakan inkonstitusional, antidemokrasi, anti-HAM.

Menurut Atip, sikap antidemokrasi BNPT terletak pada tindakannya yang secara arbitrer menentukan kriteria radikal sebuah situs Islam, tanpa rujukan objektif dan otoritatif.

"Dalam hal ini BNPT telah bertindak sebagai pemilik kebenaran tunggal, mengabaikan ruang deliberasi yang merupakan prasyarat mutlak di negara yang menganut dan mengamalkan kehidupan demokratis," katanya, Jumat (3/4).

Tindakan otoriter BNPT, lanjutnya, sangat rentan dan dapat mengarah kepada terorisme negara (state terrorism) yang menempatkan rakyat sebagai objek pelampiasan nafsu para pemangku kuasa politik.

Atip menambahkan, Kementerian Kominfo sebagai eksekutor dalam pemblokiran situs-situs Islam telah bertindak gegabah dan naif, karena tanpa pemahaman dan penyelidikan yang mendalam dan seksama langsung memblokir situs-situs Islam tersebut.

"Kominfo telah menabrak ayat-ayat konstitusi dan prinsip-prinsip HAM mengenai kebebasan berekspresi. Kominfo telah bertindak ceroboh, karena menggunakan wewenang yang dimilikinya secara melawan hukum. Kominfo telah mensubordinasi dirinya di bawah BNPT," tegasnya.

Kekeliruan dan kecerobohan Kominfo, menurut dia, dikonfirmasi oleh Kominfo ketika kemudian memutuskan untuk membentuk panel yang antara lain diminta

untuk memberi masukan mengenai kriteria suatu situs berisi muatan radikalisme.

"Apa yang dilakukan oleh Kominfo ini secara jelas merupakan pengakuan bahwa pemblokiran situs-situs tersebut tidak sah dan melawan hukum," ucapnya.

Ia menyarankan pihak-pihak yang dirugikan dapat meminta pertanggungjawaban hukum terhadap Kominfo, baik secara materil maupun immateril.

Atip juga mendorong agar Kementerian Kominfo harus meminta maaf kepada publik, khususnya umat Islam karena tindakan gegabah tersebut merugikan dan meresahkan umat Islam.

Sumber: antara

1) Tematik (tema atau Topik)

Tema atau topik berita ini adalah Pakar Hukum Universitas Padjadjaran Atip Latipulhayat yang mengomentari bahwa pemblokiran situs-situs media Islam oleh Kemenkominfo atas permintaan BNPT merupakan tindakan sepihak. Wacana yang terdapat dalam berita ini ialah bentuk kritikan dari salah satu pakar hukum terhadap pemblokiran media Islam dalam hal ini website, wacana dalam berita ini memaparkan kepada khalayak bahwa pemblokiran website yang dilakukan kemkominfo tersebut, merupakan suatu tindakan anti demokrasi dan anti HAM. Sebagaimana tertuang dalam paragraf pertama. Sehingga terkesan lebih menyudutkan pihak kemkominfo.

Dan jelas seluruh isi berita ini ialah pernyataan penolakan terhadap pemblokiran website-website tersebut.

2) Skematik (Skema atau Alur)

Skema atau alur pada berita ini berisi beberapa Komentar pakar Hukum UNPAD yang menilai bahwa pemblokiran bersifat sepihak, anti demokrasi dan otoriter. Komentar bahwa tindakan Kemkominfo dinilai gegabah, dan tanpa penyelidikan mendalam. Diakhiri Saran agar pihak-pihak yang dirugikan untuk meminta pertanggungjawaban hukum terhadap tindakan kemkominfo.

3) Semantik (Latar, Detail, Ilustrasi, Maksud, Pengandaian, dan Penalaran)

Latar pada berita ini ialah pada paragraf *Menurut Atip, sikap antidemokrasi BNPT terletak pada tindakannya yang secara arbitrer menentukan kriteria radikal sebuah situs Islam, tanpa rujukan objektif dan otoritatif. (paragraf 2).* Yaitu tindakan pemblokiran yang di nilai antidemokrasi.

Didukung oleh Detail pada berita ini *"Dalam hal ini BNPT telah bertindak sebagai pemilik kebenaran tunggal, mengabaikan ruang deliberasi yang merupakan prasyarat mutlak di negara yang menganut dan mengamalkan*

kehidupan demokratis," katanya, Jumat (3/4). (Paragraf 3). Kalimat ini di sisipkan untuk menguatkan isi berita, sebuah kalimat langsung yang isinya jelas mengomentari pemblokiran website. Dan menganggap pemblokiran suatu kesalahan dan pelanggaran.

Ilustrasi pada berita ini diantaranya terdapat pada paragraf kelima yang tertulis, *Kementerian Kominfo sebagai eksekutor dalam pemblokiran situs-situs Islam telah bertindak gegabah dan naif, (Paragraf 5).* Pada kata bertindak gegabah menggambarkan tindakan kemkominfo yang dipandang gegabah dalam pemblokiran website ini. Juga pada paragraf lain banyak juga kalimat-kalimat yang menggambarkan hal serupa seperti *"Kominfo telah menabrak ayat-ayat konstitusi dan prinsip-prinsip HAM mengenai kebebasan berekspresi"* (Paragraf 6).

Maksud dalam berita ini terdapat pada paragraf keenam, sebuah kalimat langsung yang berbunyi *"Kominfo telah menabrak ayat-ayat konstitusi dan prinsip-prinsip HAM mengenai kebebasan berekspresi (Paragraf 6).* Sebuah kalimat yang lebih jelas dan tegas menyatakan bahwa tindakan kemkominfo telah melanggar hukum. Pernyataan ini lebih menguatkan wacana pada berita ini.

Pengandaian pada berita ini ialah pada paragraf kesembilan, *Ia menyarankan pihak-pihak yang dirugikan dapat meminta pertanggungjawaban hukum terhadap Kominfo (Paragraf 9)*. Ini ialah harapan yang ada pada berita ini yaitu terlukis pada kata *menyarankan* dimana berarti permintaan pertanggung jawabanya belum dilakukan. Dengan berita ini diharapkan adanya hal tersebut. Pengandaian juga terdapat pada paragraf kesepuluh “*Atip juga mendorong agar Kementerian Kominfo harus meminta maaf kepada publik, (paragraf 10)*. Tergambar dari kata *harus*. Suatu harapan yang tegas terdapat dari wacana dari berita ini.

Adapun penalaran yang digunakan ialah penalaran *deduktif* dimana pernyataan pertanyaan yang terdapat dalam berita ini ialah bagian dari penjelasan pernyataan awal. Ini digunakan guna wacana yang disampaikan penulis terusun sistematis mengikuti alur wacana diawali pernyataan bahwa kemkominfo dinilai sepihak sampai usulan agar pihak pengelola website menuntut secara hukum kemkominfo.

c. Analisis berita 3edisi Senin, 06 April 2015, 09:32 WIB

Pemilik Situs Islam Bisa Ambil Langkah Hukum Lawan Pemerintah

Rep: c26/ Red: Esthi Maharani, Mardiyah



22 Situs Islam Diblokir

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi I DPR RI menyayangkan tindakan pemerintah yang semena-mena memblokir 22 situs Islam secara tiba-tiba. Pemerintah dinilai menyamaratakan semua sebagai situs bermuatan radikalisme.

"Pemerintah sangat sewenang-wenang menyamaratakan atau pukul rata tanpa melalui proses pengadilan," kata Hanafi Rais saat dihubungi Republika, Ahad (5/4) malam.

Menurutnya dari sekian situs memang ada yang menurutnya kurang tepat. Tapi sebagian besar ia menilai situs yang diblokir Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) tersebut tidak seperti yang dituduhkan pemerintah.

"Jadi dalam kenyataan ini terlihat pemerintah melakukan tindakan tanpa mengkaji terlebih dahulu isi situs yang diblokirnya," katanya.

Hal tersebut dinilainya membahayakan kebebasan masyarakat sipil. Rakyat merasa dirugikan karena kebebasan berpendapatnya menjadi dibatasi. Pemerintah juga dinilai melanggar undang-undang.

"Pemilik situs yang merasa dirugikan seharusnya bisa mengambil tindakan

hukum atas kebijakan pemerintah ini," katanya.

Sebelumnya Kemkominfo memblokir situs Islam pekan lalu. Kebijakan ini langsung menuai banyak kontroversi. Protes datang bertubi-tubi dari berbagai kalangan. Mereka menuduh pemerintah menyalahi kebebasan pers yang sudah diatur undang-undang.

1) Tematik (tema atau Topik)

Topik pada berita ini tertuang dalam paragraf pertama, "*Wakil Ketua Komisi I DPR RI menyayangkan tindakan pemerintah yang semena-mena memblokir 22 situs Islam secara tiba-tiba. (Paragraf 1).*" Wacana utamanya lagi adalah komentar yang tidak menyetujui pemblokiran, jika pada berita sebelumnya pemerintah dinilai antidemokrasi maka kali ini pemerintah dinilai sewenang-wenang dalam memblokir website.

2) Skematik (Skema atau Alur)

Skema pada berita ini dimulai dengan Komentar dari wakil ketua Komisi I DPR RI yang menilai tindakan pemblokiran ialah tindakan yang sewenang-wenang, dan tanpa proses pengadilan. Kemudian pemblokiran dinilai membahayakan kebebasan masyarakat dan melanggar undang-undang. Dan diakhiri dengan menerangkan pemblokiran website menuai banyak kontroversi.

3) Semantic (Latar, Detail, Ilustrasi, Maksud, Pengandaian, dan Penalaran)

Latar pada berita ini ialah "*Wakil Ketua Komisi I DPR RI menyayangkan tindakan pemerintah yang semena-mena memblokir 22 situs Islam secara tiba-tiba. Pemerintah dinilai menyamaratakan semua sebagai situs bermuatan radikalisme*" (Paragraf 1). Paragraf pertama ini yang menjadi latar belakang berita ini yaitu opini dari wakil ketua komisi 1 DPR RI.

Detail pada berita ini terdapat pada paragraph "*Pemerintah sangat sewenang-wenang menyamaratakan atau pukul rata tanpa melalui proses pengadilan,*" (Paragraf 2). Wacana dikuatkan dengan detail didalamnya dan kutipan hanafi rais ini menguatkan wacana dalam berita ini, dengan pilihan kata sewenang-wenang, dan pukul rata yang terdapat didalamnya.

Tidak hanya dengan detail wacana suatu berita bisa menjadi kuat.. namun diperlukan juga maksud. Maksud pada berita ini tergambar dalam paragraf keempat "*Jadi dalam kenyataan ini terlihat pemerintah melakukan tindakan tanpa mengkaji terlebih dahulu isi situs yang diblokirnya,*" (Paragraf 4). Dengan kata jadi bisa ditafsirkan bahwa opini ini sangat penting dan lebih khusus, yaitu

menyakinkan lagi bahwa pemerintah melakukan pemblokiran tanpa mengkaji dulu, seperti itu menurut narasumber.

Ilustrasi untuk memantaskan berita ini terdapat pada *“Kebijakan ini langsung menuai banyak kontroversi” (Paragraf 7)*. Menggambarkan reaksi dari pemblokiran ini yaitu adanya pro dan kontra di masyarakat.

Pengandaian yang jelas terlihat pada berita ini pada paragraf sebagai berikut *“Pemilik situs yang merasa dirugikan seharusnya bisa mengambil tindakan hukum atas kebijakan pemerintah ini,” katanya. (Paragraf 6)*. Penalaran pada berita ini menggunakan penalaran *deduksi* seperti pada berita komentar sebelumnya.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari segi tematis wacana yang terdapat pada berita di republika online terkait pemblokiran website ditampilkan dengan sangat beragam dan menarik, serta berimbang. Adanya pro kontra dalam wacana tersebut disampaikan dengan lugas dan jelas.

Dari segi skematis, wacana yang terdapat pada berita di republika online terkait pemblokiran website disajikan

dengan baik dan berkesinambungan, sehingga wacana yang dihadirkan dapat dengan baik diterima oleh pembaca. Dimulai dari awal mula pemblokiran, pro dan kontra pemblokiran hingga jalan keluar yang berupa dibukanya kembali website yang diblokir. Tersusun dengan apik dan menarik.

Dari segi sematis, wacana disajikan dengan sangat baik dan lugas, latar belakang, detail yang melengkapi, penekanan, pengandaian dan ilustrasi tersusun dengan pas dan menghidupkan wacana pemblokiran.

Arah wacana yang dihadirkan republika online lebih condong kepada kontra terhadap pemblokiran website Islam. Dan lebih memojokan kekominfo sebagai pihak yang bersalah. Hal ini terlihat dari analisis wacana yang telah dilakukan penulis baik, terutama pada analisis semantik.

2. Saran

Bagi para pembaca terkhusus mahasiswa jurusan komunikasi penyiaran Islam agar dapat menyajikan penelitian penelitian ter update lainnya yang berkembang seputar komunikasi, media, dan portal website lainnya.

Bagi para pembaca terkhusus mahasiswa jurusan komunikasi penyiaran

Islam agar dapat lebih menelaah kembali bagaimana wacana terkait pemblokiran ini pada portal website lainnya. Karena penelitian ini hanya mengkhususkan penelitian pada republika.co.id saja. Untuk selanjutnya dalam penelitian analisis wacana media online akan lebih baik jika meneliti lebih banyak media sebagai pembandingan.

DAFTAR PUSTAKA

Aliyah, D.Y. 2013. *Analisis Wacana Kritis*, Bandung: Yrama Widya.

Badara, A. 2012. *Analisis Wacana: Teori, Metode, dan Penerapannya pada Wacana Media*, Jakarta: Kencana Predana Media Grup.

Bungin, B. 2007. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenas Media Group.

<http://teknoliputan6.com/read/2199730/kominfo-blokir-22-situs-yang-dianggap-radikal>

[http://www.merdeka.com/peristiwa/pe-
nah-diblokir-hidayatullahcom-masih-
tak-terima-dianggap-radikal.html](http://www.merdeka.com/peristiwa/pe-
nah-diblokir-hidayatullahcom-masih-
tak-terima-dianggap-radikal.html)

[http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-
s,detail-ids,44-id,58744-lang,id-
c,nasional-](http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-
s,detail-ids,44-id,58744-lang,id-
c,nasional-)

[http://www.republika.co.id/berita/trendtek/
internet/15/04/07/nmetpd-](http://www.republika.co.id/berita/trendtek/
internet/15/04/07/nmetpd-)

[pemblokiran-situs-berkonten-
negatif-kemenkominfo-dinilai-
tidak-efektif](http://www.republika.co.id/berita/trendtek/
internet/15/04/07/nmetpd-
pemblokiran-situs-berkonten-
negatif-kemenkominfo-dinilai-
tidak-efektif)

Sobur, Alex. *Analisis Teks Media*, Bandung: Rosdakarya, 2004.

Suprihatiningsih. 2012 “Spritualitas Gerakan Radikalisme Islam di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 32, No. 2.

Susanto. *Metode Penelitian Sosial*, Surakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS, 2006.

Tarigan, H. G. 2009. *Pengajaran Wacana*, Bandung: Angkasa.